

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesat. Perkembangan yang pesat tidak hanya di bidang teknologi perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi metode komputerisasi juga ikut berkembang. Para ahli terus mengembangkan teknologi yang ada, bahkan para ahli percaya bahwa dengan menggunakan teknologi dapat membantu mereka menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kehidupan manusia adalah bidang jasa.

Angkutan umum merupakan angkutan yang disediakan untuk keperluan umum yang dilakukan dengan sistem sewa dan bayar dapat berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang dan bus besar. Umumnya masyarakat menghendaki pelayanan angkutan umum yang aman, cepat, murah dan nyaman. (Andreas, Peruzzi Willy, Kriswardhana Anik, 2018). Kebutuhan akan angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi sangat diperlukan khususnya di wilayah perkotaan termasuk di kota Batusangkar. Hal ini disebabkan karena Kota Batusangkar termasuk salah satu kota yang padat penduduk. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat menangani masalah tersebut untuk menentukan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir.

Sistem yang digunakan adalah sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu menentukan kelayakan angkutan umum, sehingga sistem dapat

menangani permasalahan yang terjadi. Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang dapat membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah tertentu dengan memanfaatkan data dan model tertentu. Turban dan Aronson menyebutkan bahwa konsep sistem penunjang keputusan (SPK) muncul pertama kali pada tahun 1970-an oleh Scott-Morton. Mereka mendefinisikan sistem sebagai suatu sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan masalah yang bersifat tidak terstruktur. (Aldo, 2019).

Metode MOORA adalah metode yang diperkenalkan oleh Brauers dan Zavadkas pada tahun 2006. Metode yang relatif baru ini pertama kali digunakan oleh Brauers pada tahun 2003 dalam suatu pengambilan dengan multi-kriteria. Metode MOORA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Metode ini memiliki tingkat selektifitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan. Dimana kriteria dapat bernilai menguntungkan (benefit) atau yang tidak menguntungkan (cost). Metode MOORA banyak diaplikasikan dalam beberapa bidang seperti bidang manajemen, bangunan, kontraktor, desain jalan, dan ekonomi. Metode ini memiliki tingkat selektifitas yang baik dalam menentukan suatu alternatif. Pendekatan yang dilakukan MOORA didefinisikan sebagai suatu proses secara bersama-sama guna mengoptimalkan dua atau lebih yang saling bertentangan pada beberapa kendala. (Manurung, 2018).

Dari berbagai pertimbangan di atas, maka diperlukan suatu sistem pendukung keputusan dalam kelayakan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kota Batusangkar, diharapkan dapat membantu pihak dinas perhubungan dalam menentukan kelayakan angkutan umum dan memberi keputusan yang tepat dalam pengujian kelayakan angkutan umum. Diperlukan adanya sistem untuk meminimalisasi masalah tersebut, diantaranya dengan merancang sistem yang dapat menangani penilaian kelayakan angkutan umum secara otomatis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN METODE MOORA DALAM KELAYAKAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UJI KIR DI DINAS PERHUBUNGAN BATUSANGKAR”**.

## **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir dapat membantu proses penilai kelayakan uji kir angkutan umum pada Dinas Perhubungan Batusangkar?
2. Bagaimana menerapkan metode MOORA dalam penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir di Dinas Perhubungan Batusangkar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat?
3. Bagaimana menghasilkan laporan hasil perhitungan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir pada Dinas Perhubungan Batusangkar sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

### **1.3. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir dapat membantu proses penilaian kelayakan uji kir angkutan umum pada Dinas Perhubungan Batusangkar.
2. Diharapkan dengan menerapkan metode MOORA dalam penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir di Dinas Perhubungan Batusangkar dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir menggunakan metode MOORA dapat menghasilkan laporan hasil perhitungan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Dinas Perhubungan Batusangkar.

### **1.4. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini lebih terarah serta pembahasan permasalahan yang dihadapi tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah dalam penulisan yaitu:

1. Sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk menentukan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir pada Dinas Perhubungan Kota Batusangkar.
2. Sistem pendukung keputusan ini dibangun menggunakan metode MOORA.

3. Penelitian ini berfokus pada penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Membangun sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat.
2. Membangun sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode MOORA sehingga membantu instansi dalam proses penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir.
3. Untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan dalam penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan sebagai acuan dalam pengembangan sistem selanjutnya.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Batusangkar, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan penentuan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir.

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang melakukan penelitian serupa.

### **1.7. Tinjauan Umum Perusahaan**

Dinas Perhubungan membantu sebagian besar tugas Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2009 sampai dengan 2016. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian khusus yang diperlukan dan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, antara lain program sasaran kebijakan dan perencanaan (reorientasi). Reorientasi sasaran bisa diterapkan dengan aturan yang sistematis, didukung oleh tenaga manusia dan profesional, yang mampu menangani tantangan berat dimasa-masa yang akan datang.

Dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika, maka tanggung jawab Dinas Perhubungan tidak lagi memperhatikan bidang komunikasi dan informatika. Tugas dan tugas Dinas Perhubungan dalam hal-hal yang meliputi: pelayanan perizinan, penyelenggaraan perhubungan darat, layananan sungai dan laut, layanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor, manajemen terminal angkutan penumpang, manajemen perpakiran, perhubungan.

#### **1.7.1. Visi dan Misi**

Visi dan Misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya, perusahaan memiliki dasar

dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Adapun Visi dan misi pada Dinas Perhubungan Batusangkar adalah:

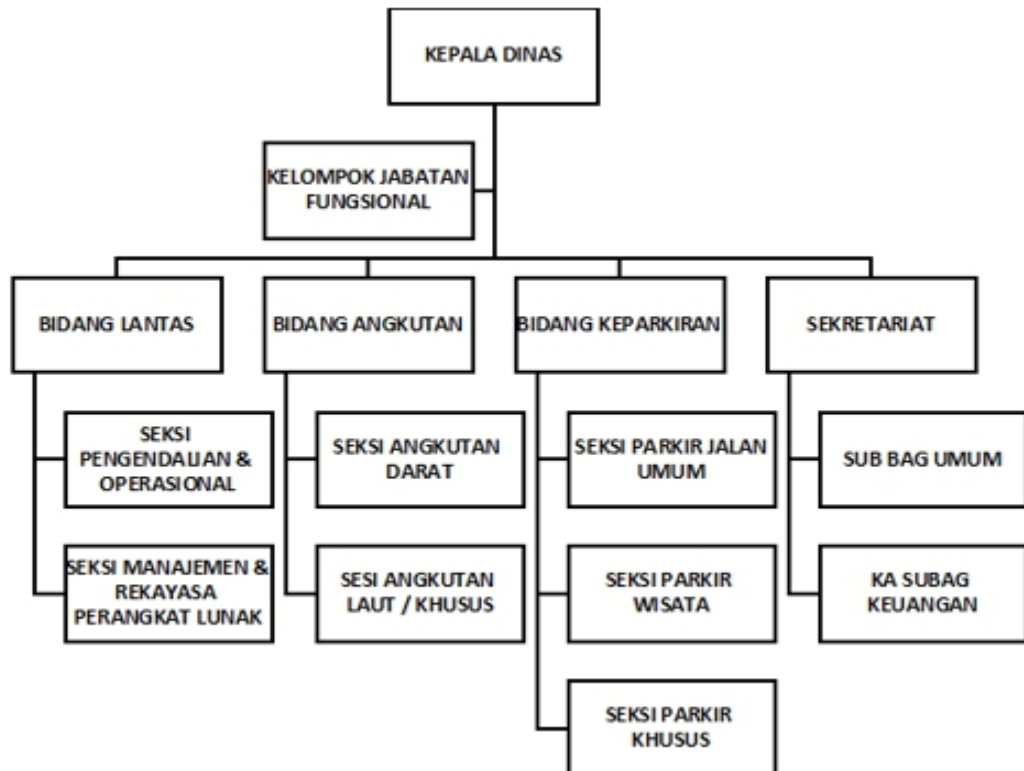
Visi: Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Misi:

1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### **1.7.2. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanah Datar. Untuk lebih jelasnya bagan stuktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Batusangkar

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Tanah Datar**

### 1.7.3. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan tugas dan wewenang masing-masing bagian:

#### 1. Kepala Dinas

##### a. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.



b. Wewenang

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang. teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, dan lalulintas.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Lantas**

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas.
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas.
- c. pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).
- d. perumusan dan permasalahan data yang berkaitan dengan perlengkapan jalan/fasilitas LLAJ.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang lalu lintas.

**3. Bidang Angkutan**

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan.
- b. pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan.

- c. pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

#### **1.8. Bidang Keparkiran**

#### **1.9. Sekretariat**

- a. penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- c. penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

#### **1.10. Seksi Pengendalian dan Operasional**

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawassan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengaturan dan pengamanan lalu lintas angkutan jalan.
- c. Merencanakan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan penegakan peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **1.11. Seksi Manajemen dan Rekayasa Perangkat Lunak**

Membantu kepala bidang lalu lintas dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan manajemen rekayasa lalu lintas jalan.

**1.12. Seksi Angkutan Darat**

Membantu kepala bidang angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan angkutan darat

**1.13. Seksi Angkutan Laut**

Membantu kepala bidang angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan angkutan darat

**10. Seksi Parkir Jalan Umum**

Membantu kepala bidang keparkiran dalam Menyusun dan mengatur area perparkiran di jalan umum.

**11. Seksi Parkir Wisata**

Membantu kepala bidang keparkiran dalam Menyusun dan mengatur area perparkiran di lokasi wisata.

**12. Seksi Parkir Khusus**

Membantu kepala bidang keparkiran dalam Menyusun dan mengatur area perparkiran di bagian yang khusus.

**13. SUB Bagian Umum**

Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengolaan dan penyusunan program dan pelaporan dinas.

**14. SUB Bagian Keuangan**

Membantu sekretaris dalam melaksanakan pengolaan keuangan dinas.